

LAMPIRAN I

**PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 137 TAHUN 2015**

**TENTANG
RINCIAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2016**

RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

LAMPIRAN I
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

(dalam ribuan rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	1.506.577.545.056
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan (PPh)	757.230.120.000
1.1.1	Pendapatan PPh Migas	41.441.520.000
1.1.1.1	Pendapatan PPh Minyak Bumi	13.149.565.000
1.1.1.2	Pendapatan PPh Gas Bumi	28.291.955.000
1.1.2	Pendapatan PPh Nonmigas	715.788.600.000
1.1.2.1	Pendapatan PPh Pasal 21	139.412.345.000
1.1.2.2	Pendapatan PPh Pasal 22	9.728.454.000
1.1.2.3	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	58.644.239.000
1.1.2.4	Pendapatan PPh Pasal 23	37.281.667.000
1.1.2.5	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	6.787.905.000
1.1.2.6	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	302.879.491.000
1.1.2.7	Pendapatan PPh Pasal 26	52.027.862.000
1.1.2.8	Pendapatan PPh Final	108.957.829.000
1.1.2.9	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	68.808.000
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah	571.732.700.000
1.2.1	Pendapatan PPN Dalam Negeri	325.868.240.568
1.2.2	Pendapatan PPN Impor	217.668.480.383
1.2.3	Pendapatan PPN Lainnya	227.312.250
1.2.4	Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	16.555.584.029
1.2.5	Pendapatan PPnBM Impor	11.337.312.020
1.2.6	Pendapatan PPnBM Lainnya	75.770.750
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	19.408.001.816
1.3.1	Pendapatan PBB Perkebunan	1.460.576.225
1.3.2	Pendapatan PBB Perhutanan	397.668.380
1.3.3	Pendapatan PBB Pertambangan	1.023.769.863
1.3.4	Pendapatan PBB Migas	16.525.987.348
1.4	Pendapatan Cukai	146.439.923.240
1.4.1	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	139.817.757.500
1.4.2	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	165.500.000
1.4.3	Pendapatan Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	6.456.665.740
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	11.766.800.000
2.	Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	40.087.103.800
2.1	Pendapatan Bea Masuk	37.203.870.000
2.2	Pendapatan Bea Keluar	2.883.233.800
TOTAL		1.546.664.648.856



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
RINCIAN PENERIMAAN PERPAJAKAN

Memorandum Item:	
Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) terdiri atas:	
1. Pajak Penghasilan (PPh)	7.603.554.500
a. PPh Panas Bumi	1.310.000.000
b. PPh bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal	6.170.000.000
c. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007	39.084.500
d. PPh Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan Secara Mutlak Piutang Negara Non Pokok yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang Diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tertentu	84.470.000
2. Bea Masuk	580.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Perekonomian
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



Lydia Silvanna Djaman